

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELUARAN
PEMERINTAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2008-2017**



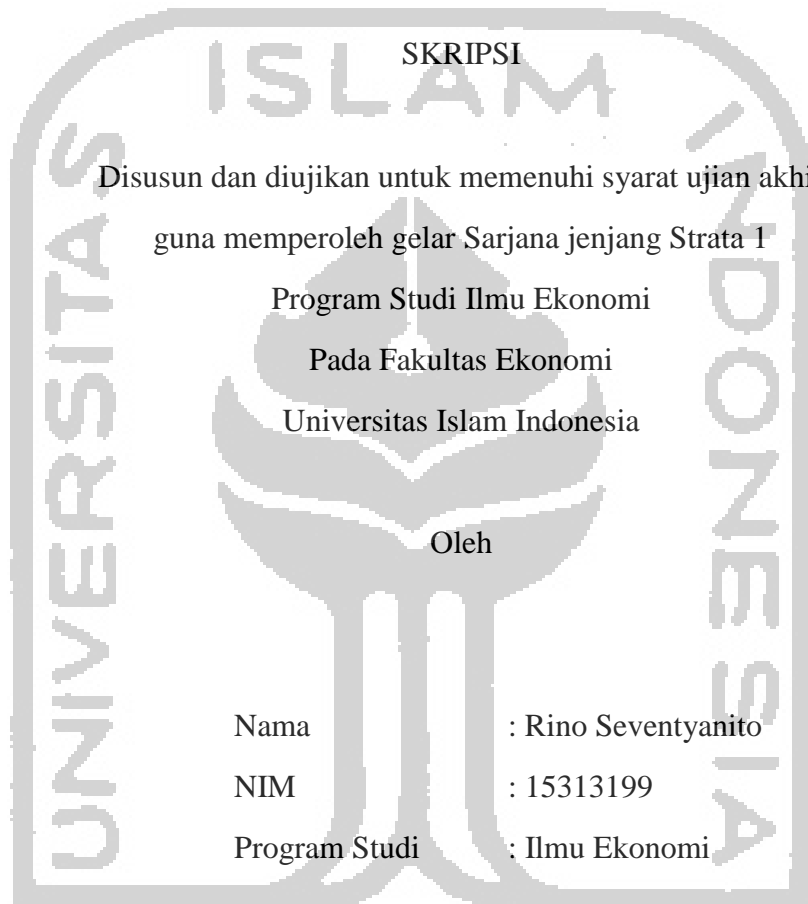
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2019

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELUARAN
PEMERINTAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2008-2017**



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Saya yang telah bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh - sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Progam Studi Ilmu Ekonomi FE UH. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup bersedia menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."



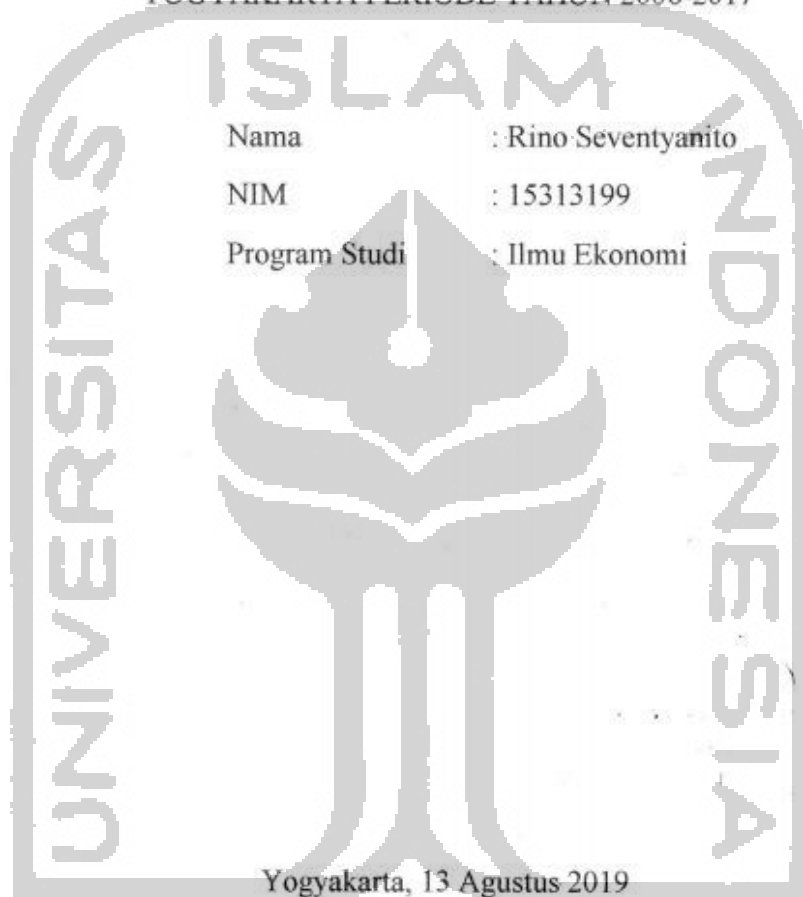
Yogyakarta, 13 Agustus 2019



Penulis

PENGESAHAN

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELUARAN
PEMERINTAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2008-2017



Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing

Nur Feriyanto, Dr., M.Si

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELUARAN PEMERINTAH DI
KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN
2008-2017**

Disusun Oleh : **RINO SEVENTYANITO**

Nomor Mahasiswa : **15313199**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 9 September 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Nur Feriyanto, Dr., M.Si

Penguji : Indah Susantun, Dra., M.Si.



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur atas berkat rahmat dan karunia kekuatan yang diberikan Allah S.W.T akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2008-2017”. Karya ini saya persembahkan kepada Ibu dan Bapak sebagai tanda hormat dan bakti, tidak lupa rasa terimakasih tak terhingga karena telah memberikan kasih sayang, dukungan serta senantiasa nasihat dan dorongan yang tak pernah bosan sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini. Semoga berkah dan menjadi langkah awal dalam proses kehidupan dalam membahagiakan kedua orang tua di dunia maupun akhirat.



HALAMAN MOTTO

“Be yourself. No one can say you’re doing it wrong.” (Peneliti)

“Work Hard. Do your best. Keep your word. Never get too big for your britches.

Trust in God. Have no fear; and Never forget a friend.” (Peneliti)

“One of the things I learned the hard way was that it doesn’t pay to get discouraged. Keeping busy and making optimism a way of life can restore your faith in yourself”. (Randy Blythe)

“Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri Anda sendiri.” (Anonym)

“Keep smiling, because life is a beautiful thing and there’s so much to smile about.” (Marlin Monroe)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, atas limpahan karunia dan berkah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2008-2017. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Peneliti menyadari dalam penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar di kemudian hari dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Tak lupa juga dalam penelitian skripsi ini selalu mendapat bimbingan, semangat serta dorongan dari banyak pihak. Tak lupa ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada:

1. Allah Subhanahu wa ta ala, yang senantiasa memberi petunjuk, jalan terang serta kesehatan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
2. Nabi besar Muhammad Shallallahu'alaihi wa salam yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang saat ini, sehingga kita dapat mengambil semua pelajaran seperti apa yang telah Beliau lakukan.
3. Orang tua yang saya sayangi, Bapak Suroto, dan Ibu Purwani, dan kakak saya Renita Yuliana, serta keluarga besar yang telah mendukung dari segi

spiritual maupun moral, terimakasih semoga semua kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT.

4. Bapak Dr. Nur Feriyanto, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya, dan kesabarannya. Atas segala bimbingan, saran, dan ilmunya yang bermanfaat kepada peneliti.
5. Bapak Dr. Jaka Sriyana, SE.,M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Sahabudin Sidiq, S.E., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah mengajarkan ilmunya selama peneliti menuntut ilmu pada kampus ini. Dosen beserta seluruh Staff/Karyawan Akademik Jurusan Ilmu Ekonomi Khususnya dan Dosen serta Staff Tata Usaha dan Staf Akademik di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
8. Teman-teman seperjuangan yang tak henti-hentinya memberi dukungan serta doa, yaitu Arindra Krisna Andara, Naufal As Shidiqi, Singgih Wijayanto, Fadhil Driya Warastra, Adi Prabowo, Enggar Rajawali, Muhammad Hafiz, Puja Setia Wijaya, Rafi Febian, Sri Wisnu Asihanto, Wirawan Satria, Ahmad Syukron.
9. Teman-teman KKN Angkatan 58 Unit 106-111. Terutama untuk unit 111, Risky Aprian, Sony Raditya, Dwi Putra Mutianda, M Azki Rido Kuncoro, Devia Winarni dan Vidya.

10. Seluruh mahasiswa Ilmu Ekonomi 2015 yang telah memberi banyak pelajaran hidup, termasuk makna hidup serta semangat hingga akhir perkuliahan ini.
11. Teman-teman SD, SMP, SMA, dan lingkungan rumah yang telah membentuk diri saya sebagaimana mestinya
12. Semua pihak yang tidak mungkin dapat disebutkan satu per satu, tanpa bermaksud untuk mengurangi rasa terima kasih penulis kepada kalian semua.

Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah ikut berkontribusi dalam penelitian skripsi ini dengan harapan yang besar semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti ataupun pembaca. Semoga segala kebaikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Yogyakarta, 13 Agustus 2019

Peneliti

Rino Seventyanito

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN UJIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAKSI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	13
2.1 Kajian Pustaka.....	13
2.2 Landasan Teori.....	17
2.2.1 Pengeluaran Pemerintah.....	17
2.2.2 Pendapatan Asli Daerah.....	21
2.2.3 Dana Perimbangan.....	22
2.2.4 Masyarakat Terdidik.....	24
2.3 Hubungan Antar Variabel.....	26
2.3.1 Hubungan antara PAD dengan Pengeluaran Pemerintah.....	26
2.3.2 Hubungan antara Dana Perimbangan dengan Pengeluaran Pemerintah.....	27
2.3.3 Hubungan antara Jumlah Masyarakat Terdidik dengan Pengeluaran Pemerintah.....	27
2.4 Kerangka Pemikiran.....	29
2.5 Hipotesis Penelitian.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.2 Definisi Operasional Variabel dan Variabel Penelitian.....	31

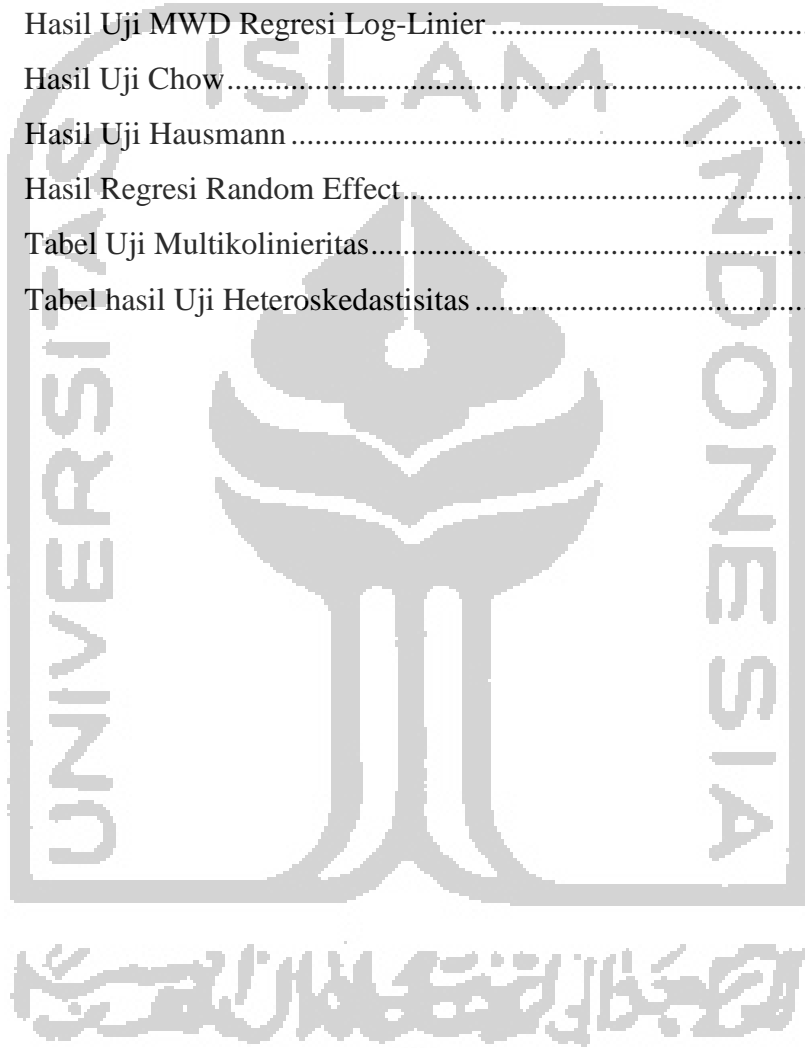
3.3 Metode Analisis.....	33
3.3.1 Uji MacKinonn, White, and Davidson (MWD)	33
3.3.2 Regresi Data Panel.....	35
3.3.3 Uji Asumsi Klasik.....	41
3.3.4 Uji Hipotesis	44
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Deskripsi Data Penelitian	47
4.2 Hasil Uji Model Regresi Panel	47
4.2.1 Uji MWD (MacKinonn, White, Davidson)	47
4.2.2 Hasil Regresi Panel.....	49
4.3 Uji Asumsi Klasik	52
4.3.1 Uji Multikolinieritas	52
4.3.2 Uji Heteroskedastisitas	54
4.4 Uji Hipotesis.....	56
4.4.1 Uji t (Pengujian Secara Individu)	56
4.4.2 Uji F (Uji Secara Menyeluruh)	57
4.4.3 Koefisien Determinasi (R-Squared).....	58
4.5 Intepretasi Hasil.....	59
4.6 Analisis Ekonomi	60
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Implikasi	63
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

1.1. Laporan Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2017	7
1.2. Laporan Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2017.....	7
1.3. Laporan Dana Perimbangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2017 8	
1.4. Laporan Jumlah Masyarakat Terdidik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2017	8
4.1. Hasil Uji MWD Linier	48
4.2. Hasil Uji MWD Log Linier.....	48
4.3. Hasil Uji MWD	49
4.4. Hasil Uji Chow (F-Statistik)	50
4.5. Hasil Uji Hausmann test.....	51
4.6. Tabel multikolinieritas	54
4.7. Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas	55
4.8. Tabel Hasil Uji t	56
4.9. Tabel Hasil Uji F dengan Estimasi Random Effect	57
4.10. Tabel Hasil R Squared Dengan Estimasi Random Effect.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

I.	Data Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah masyarakat Terdidik di Provinsi DIY tahun 2008-2017.....	67
II.	Hasil Uji MWD Regresi Linier.....	69
III.	Hasil Uji MWD Regresi Log-Linier.....	70
IV.	Hasil Uji Chow.....	71
V.	Hasil Uji Hausmann.....	72
VI.	Hasil Regresi Random Effect.....	73
VII.	Tabel Uji Multikolinieritas.....	74
VIII.	Tabel hasil Uji Heteroskedastisitas.....	75



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Masyarakat yang mempunyai pendidikan tinggi terhadap Jumlah Pengeluaran Pemerintah yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah model regresi data panel, yaitu dengan menggunakan metode *Random Effect*. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif, Dana Perimbangan berpengaruh signifikan positif dan Jumlah Masyarakat terdidik tidak berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata kunci : Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Populasi, Masyarakat Berpendidikan Tinggi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan program dari pemerintah yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut Todaro (2003) pembangunan merupakan proses yang mana dapat meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat, serta standar kehidupan masyarakat, harga diri dan kebebasan individu yang ada didalamnya. Pertumbuhan juga diartikan dengan peningkatan pendapatan perkapita atau biasa disebut *income per capita*. Peningkatan pendapatan, dapat berpengaruh pada peningkatan taraf hidup masyarakat, melalui program yang dilakukan oleh pemerintah, pembangunan dapat mengatasi kemiskinan yang terjadi.

Di Indonesia sendiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan, pemerintah pada tahun 1998 melakukan desentralisasi. Kebijakan *Desentralisasi* dimana seluruh wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk mengendalikan dan mengatur semua bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam kebijakan fiskal, politik, administratif, serta pasar.

Berdasarkan kebijakan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian direvisi dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan

mengurus rumah tangganya. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang dalam mengelola sumber daya yang ada di daerahnya. Sumber daya yang dikelola semua sumber daya, baik sumber daya alam yang ada dan pengembangan sumber daya manusianya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 juga menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada di daerahnya dengan adanya bantuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam menentukan kebijakan yang akan digunakan untuk menjalankan kebijakan Desentralisasi yang dimulai sejak tahun 1998.

Dimulainya kebijakan desentralisasi tahun 1998, mulai saat itu pula pemerintahan daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab menentukan kebijakan, mengambil keputusan, dan mengatur keuangan daerahnya secara bebas dan mandiri. Keuangan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Alokasi khusus, Dana Perimbangan. Sumber-sumber tersebut yang mengelola adalah pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menuju penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk di kembangkan menjadi sumber PAD. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah – daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001). Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya

memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor – sektor yang produktif di daerah

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah, pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Selain dari dana perimbangan tersebut pemerintah daerah juga mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan dan Lain- lain Pendapatan. Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan daerah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber- sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab yang

hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Transformasi paradigma dalam hal ini terletak pada aspek akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam rangka mengelola sumber-sumber ekonomi yang semula bersifat akuntabilitas *vertikal* (kepada Pemerintah) menjadi akuntabilitas *horizontal* (kepada masyarakat di daerah) (Mardiasmo, 2002). Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan public (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah.

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah *financial*. Meski begitu Pemerintah Pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang di transfer ke Pemerintah Daerah. Dalam praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh Pemerintah Daerah "dilaporkan" diperhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri.

Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Adi, 2006). Hal ini

menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat ini. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hasil positif yang tercermin dalam peningkatan PAD.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Brata (2004) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kedua komponen tersebut adalah PAD dan Bagian Sumbangan & Bantuan. Namun demikian, penelitian Brata (2004) belum mencakup periode setelah otonomi daerah sehingga hubungan PAD dan Pertumbuhan ekonomi dapat saja mengarah ke hubungan negatif jika daerah terlalu ofensif dalam upaya peningkatan penerimaan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB/PDRB), namun demikian indikator ini dianggap tidak selalu tepat dikarenakan tidak mencerminkan makna pertumbuhan yang sebenarnya.

Indikator lain, yaitu pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi ini (Kuncoro,2004). Indikator ini lebih komprehensif dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dikarenakan lebih menekankan pada kemampuan negara/daerah untuk meningkatkan

PDB/PDRB agar dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Indikator ini secara simultan menunjukkan apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan seiring dengan semakin cepatnya laju pertumbuhan penduduk.

Di sisi lain kemampuan keuangan pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, dalam rangka desentralisasi kepada setiap daerah dituntut untuk dapat membiayai diri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Peran pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah (Halim, 2001).

Pengeluaran pemerintah Indonesia pada tahun 2015 berjumlah 2039,5 triliun rupiah, lalu pada 2016 berjumlah 2095,7 triliun rupiah, kemudian pada tahun 2017 jumlah pengeluarannya sebesar 2080,5 triliun. Pengeluaran pemerintah ini ditujukan untuk pembangunan nasional dan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dalam menjalankan fungsinya dan dapat mewujudkan kesejahteraan.

Berikut ini adalah data mengenai pengeluaran pemerintah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan jumlah masyarakat terdidik daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2015-2017:

Tabel 1.1

Laporan Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2015-2017

(Dalam Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017
Yogyakarta	Rp 1.539.699,34	Rp 1.665.420,97	Rp 1.484.920,70
Bantul	Rp 1.979.120,18	Rp 2.223.664,72	Rp 2.161.336,00
Sleman	Rp 2.328.751,33	Rp 2.647.865,38	Rp 2.615.343,00
Gunung Kidul	Rp 1.586.001,00	Rp 1.651.553,00	Rp 1.860.225,00
Kulon Progo	Rp 1.142.545,06	Rp 1.249.917,00	Rp 1.440.263,00

Sumber : BPS Propinsi DIY

Tabel 1.2

Laporan Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2015-2017

(Dalam Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017
Yogyakarta	Rp 510.548,83	Rp 540.504,30	Rp 657.049,37
Bantul	Rp 312.419,54	Rp 349.492,00	Rp 369.224,00
Sleman	Rp 643.130,03	Rp 648.841,32	Rp 698.754,00
Gunung Kidul	Rp 196.099,00	Rp 206.278,00	Rp 271.370,00
Kulon Progo	Rp 170.822,34	Rp 180.273,69	Rp 221.215,00

Sumber : BPS Propinsi DIY

Tabel 1.3

Laporan Dana Perimbangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2017

(Dalam Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017
Yogyakarta	Rp 652.748,11	Rp 875.430,55	Rp 871.360,23
Bantul	Rp 1.037.859,00	Rp 1.152.588,00	Rp 1.435.225,00
Sleman	Rp 1.080.162,00	Rp 1.321.933,00	Rp 1.438.087,00
Gunung Kidul	Rp 978.310,00	Rp 1.239.624,00	Rp 1.250.742,00
Kulon Progo	Rp 729.998,00	Rp 957.551,00	Rp 979.213,00

Sumber : BPS Propinsi DIY

Tabel 1.4

Laporan Jumlah Masyarakat Terdidik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

2015-2017

(Dalam Jiwa)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017
Yogyakarta	225362	218650	218401
Bantul	315439	333959	338983
Sleman	398404	412614	426337
Gunung Kidul	135163	141562	144585
Kulon Progo	138182	144906	147249

Sumber : BPS Propinsi DIY

Dapat dilihat tabel tersebut dari Propinsi Yogyakarta yang memiliki 5 Daerah Tingkat II yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota memiliki penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintahan yang masing-masing berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya, yang mana setiap

pengeluaran pemerintah yang dilakukan berdasarkan kepemilikan pendapatan yang berupa penerimaan dari potensi-potensi daerah, atau yang lebih dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah yang antara lain komponen komponennya terdiri dari penerimaan pajak dan retribusi daerah, penerimaan laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penerimaan lain-lainnya yang sah. Akan tetapi ada fakta bahwa daerah tidak akan mampu membiayai pengeluarannya baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan jika hanya menggandakan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, oleh karena itu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk pemberian bantuan dalam keuangan pemerintah daerah dengan dana perimbangan. Dana perimbangan tersebut diberikan sesuai dengan potensi daerah masing-masing atau arti lainnya daerah yang satu tidak sama dengan daerah lainnya, makin besar potensi daerah tersebut maka semakin besar dana perimbangan yang diberikan untuk melakukan pengeluarannya yang kita ketahui berupa pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, seperti contohnya adalah Kabupaten Sleman yang merupakan kabupaten yang memiliki pengeluaran pemerintah paling tinggi dibanding kabupaten kota di provinsi Yogyakarta. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah pusat perbelanjaan, hotel serta universitas yang berada di area Sleman, kemudian menyebabkan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan yang lainnya tertarik menuju tempat tempat tersebut. Karena semakin banyaknya masyarakat yang datang maka dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Semakin tingginya

Pendapatan Asli Daerah maka akan menaikkan anggaran belanja pemerintah. Di sisi lain Kabupaten Sleman juga memiliki jumlah penduduk paling banyak disbanding kabupaten atau kota yang lain. Karena potensi yang besar tersebut tidak heran kalau dana perimbangan kabupaten Sleman juga yang paling besar. Yogyakarta terkenal dengan daerah pelajar, terbukti banyak sekali orang-orang dari luar daerah Yogyakarta tiap tahunnya datang ke daerah ini untuk menuntut pendidikan. Tidak hanya pendatang, penduduk asli daerah Yogyakarta rata-rata menikmati pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan tinggi menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 adalah telah menyelesaikan pendidikan menengah atas (SMA/SMK) atau lanjut ke jenjang lebih tinggi. Di daerah Yogyakarta sendiri jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi lebih dari 45%, selebihnya masih dalam tingkat sekolah menengah bawah, dan yang lainnya tidak lulus sekolah menengah atas.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diduga ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai pengeluaran pemerintah 5 Kabupaten dan Kota di Propinsi Yogyakarta. Beberapa variabel tersebut diduga mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai pengeluaran pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis dalam penulisan skripsi ini memilih judul **“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun Anggaran 2008-2017”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan mengenai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah jumlah masyarakat terdidik berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Apakah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan jumlah masyarakat terdidik secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran pemerintah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap pengeluaran pemerintah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Menganalisis pengaruh jumlah masyarakat terdidik terhadap pengeluaran pemerintah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, jumlah masyarakat terdidik secara bersama-sama terhadap pengeluaran pemerintah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1.4. Manfaat Penelitian

1. Untuk pemerintah diharapkan mampu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan anggaran pengeluaran.
2. Untuk pembaca, diharapkan mampu menjadi sebuah karya yang dapat dijadikan sebuah referensi atau acuan pada penelitian masa mendatang.
3. Untuk peneliti, penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Alodia, Moristha (2016) melakukan penelitian tentang Analisis alokasi belanja daerah kabupaten/kota di provinsi Banten periode 2010-2014. Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu anggaran yang terdiri dari 3 komponen yaitu penerimaan, belanja rutin, dan belanja pembangunan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui PAD, DAU dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap alokasi belanja modal di provinsi Banten. Jenis penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian model regresi ini adalah data panel yang merupakan gabungan data antara data time series dan data cross section. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan Jumlah Penduduk memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Hartanto (2015) melakukan penelitian tentang pengeluaran pemerintah melalui belanja daerah di Provinsi Riau periode 2007-2011. Belanja daerah merupakan pengeluaran daerah yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat khususnya dalam memberikan pelayanan publik. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh variabel jumlah penduduk, DBH, DAU, dan DAK terhadap Pengeluaran Pemerintah. Jenis penelitian ini menggunakan uji signifikansi memakai pendekatan fixed effect dan random effect, yang bertujuan untuk memilih hasil regresi antara common effect, fixed effect atau random effect.

Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian model regresi ini adalah data panel yang merupakan gabungan data antara data time series dan data cross section. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DBH, DAU, DAK memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah, Variabel jumlah penduduk bertanda negatif dan berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah.

Dinda (2016), telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengeluaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur”. Penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui apakah daerah Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki ketergantungan terhadap dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat. Hal ini dengan dibuktikan bahwa koefisien Dana Perimbangan Provinsi Kalimantan Timur masih lebih besar daripada koefisien PAD. Jenis penelitian yang digunakan ialah kuantitatif dan data yang digunakan ialah data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode analisis panel dengan data *cross-section* dari sembilan Kabupaten/Kota serta menggunakan data *time series* dari tahun 2010-2016. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah sedangkan populasi berpengaruh negatif.

Devita Andri, Delis Arman dan Junaidi (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah kabupaten/kota di provinsi jambi periode 2007-2012. Penelitian ini menggunakan variabel dependen pengeluaran pemerintah dan variabel independen nya PAD, DAU, dan Penduduk. Jenis penelitian ini

menggunakan data sekunder berupa data dari APBD dan Jumlah Penduduk. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan gabungan data antara data time series dan data cross section. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan Penduduk memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan atau peningkatan belanja langsung kabupaten/kota di Provinsi Jambi

Kesit (2004) melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh dana alokasi umum (dau) dan pendapatan asli daerah (pad) terhadap prediksi belanja daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY). Secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa besarnya Belanja Daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi. Jika hal ini masih berlangsung terus maka otonomi daerah kemungkinan besar akan sangat terhambat. Permasalahan yang perlu dipecahkan agar tidak terjadi *flypaper effect* yang tidak lain gambaran sikap ketergantungan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Pemerintah Pusat, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah menjadi sangat penting. Disisi lain efektifitas Belanja Daerah juga perlu menjadi perhatian, karena bukan rahasia umum lagi setiap akhir tahun anggaran terjadi penghabisan anggaran belanja hal ini menunjukkan bahwa Pemda “menunggu” beberapa alokasi DAU yang diperolehnya sebelum menentukan berapa belanja yang akan dihabiskannya. DAU 2001 masih memiliki banyak kelemahan mendasar, yang tergambar dari banyaknya kritik dan protes, khususnya dari daerah-daerah yang memiliki

sumberdaya alam yang berlimpah.

Budi Setyawan dan Priyo Hari Adi (2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh *fiscal stress* terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah dan belanja modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota SeJawa Tengah). Pelaksanaan undang-undang otonomi daerah dan undang-undang yang membatasi penarikan pajak bagi pendapatan daerah, mengakibatkan pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah rata-rata mengalami tekanan keuangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya rasio realisasi PAD terhadap target PAD dengan indikasi upaya pajak atau dengan kata lain terjadi peningkatan *fiscal stress*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Fiscal Stress* mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan PAD. Hasil penelitian ini mendukung Purnaninthesa (2006) yang menyatakan bahwa dalam kondisi *fiscal stress* yang tinggi daerah semakin termotivasi untuk meningkatkan PAD dan juga mendukung temuan Dongori (2006) yang memberikan fakta empirik bahwa *fiscal stress* mempunyai pengaruh yang negatif terhadap tingkat ketergantungan daerah.

Temuan lain dalam penelitian ini adalah *fiscal stress* mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat pertumbuhan belanja pembangunan/modal. *Fiscal Stress* yang tinggi menunjukkan semakin tingginya upaya daerah untuk meningkatkan PAD-nya. Sejalan dengan hal itu, harapan untuk terus meningkatkan penerimaan sendiri ini akan sulit terwujud apabila alokasi

belanja untuk modal/ pembangunan tidak ditingkatkan. Hasil penelitian ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan Andayani (2004) yang menunjukkan adanya peningkatan belanja yang semakin tinggi pada saat fiscal stress semakin tinggi.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi diperlukannya suatu upaya yang lebih intensif melalui penggalan potensi sumber-sumber penerimaan daerah kabupaten/kota di propinsi Jawa Tengah agar mampu meningkatkan pertumbuhan PAD. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah pemerintah kabupaten/kota harus lebih efektif dalam pengalokasian belanja modal/pembangunan dalam guna memenuhi kepentingan publik, baik yang mendukung pertumbuhan ekonomi maupun untuk pelayanan publik secara langsung.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah merupakan salah satu bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah yang dipergunakan untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahun, yang telah tercantum dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional (Sukirno, 2015).

Menurut teori Keynes, pengeluaran pemerintah merupakan unsur dari permintaan agregat. Teori perhitungan pendapatan nasional $Y=C+I+G+X-M$ atau yang lebih dikenal dengan rumus pendapatan nasional yang mana variable Y sebagai penawaran agregat dan variable C , I , G , X dan M sebagai permintaan

agregat. Variabel G dilambangkan sebagai pengeluaran pemerintah, terhadap Y dari waktu ke waktu agar dapat mengetahui seberapa besar kontribusi variable G (pengeluaran pemerintah) dalam pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1996).

Pengeluaran pemerintah adalah segala bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran pemerintah daerah ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Pengeluaran pemerintah dapat dikelompokkan berdasarkan belanja langsung, belanja tidak langsung, dan pembiayaan daerah, sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak digunakan secara langsung oleh adanya program atau kegiatan,. Jenis belanja tidak langsung terdiri dari :

1.) Belanja pegawai, merupakan dana yang dikeluarkan sebagai

bentuk kompensasi dalam bentuk uang (gaji) yang diberikan kepada pegawai pemerintah sebagai bentuk imbalan jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakan.

2.) Belanja bunga, merupakan belanja yang digunakan untuk

menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang, sesuai dengan perjanjian pinjaman

berjangka yang terdiri dari jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

- 3.) Belanja subsidi, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan, dapat terjangkau oleh masyarakat luas.
- 4.) Belanja hibah, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada pemerintah maupun pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat serta perorangan yang secara spesifik telah memiliki peruntukan yang jelas.
- 5.) Belanja bantuan sosial, merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan barang kepada masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 6.) Belanja bagi hasil, merupakan anggaran dana yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 7.) Belanja bantuan keuangan, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah

desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan daerah.

8.) Belanja tidak terduga, merupakan tindakan belanja yang bertujuan untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan akan terjadi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya, yang telah ditutup.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang digunakan oleh adanya program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Jenis belanja langsung terdiri dari :

1.) Belanja pegawai (langsung), biasanya digunakan sebagai pengeluaran upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

2.) Belanja barang dan jasa (langsung), digunakan untuk pengeluaran dalam bentuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari satu tahun serta pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

3.) Belanja modal, merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti tanah, bangunan, mesin, irigasi, jalan, dan aset tetap lainnya.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan *surplus*. *Defisit* atau *surplus* terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali atau penerimaan yang perlu dibayar kembali yang terjadi pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh suatu daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan daerah merupakan sector penting di dalam pemerintahan karena sector ini merupakan sector yang menentukan suatu daerah dapat membiayai pembangunan daerahnya tersebut. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah meliputi sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah, merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang ditujukan untuk orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, tentang pajak dan retribusi daerah. Digunakan untuk memakmurkan rakyat dan tidak mendapat imbalan secara langsung.
- b. Retribusi Daerah, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan dari pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, merupakan komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- d. Lain-lain Pendapatan yang Sah, merujuk pada UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan daerah, menerangkan bahwa lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan daerah selain Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, antara lain penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, potongan dan selisih nilai tukar, pendapatan bunga deposito, penerimaan jasa giro, dan tuntutan ganti rugi dan komisi.

2.2.3 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk dikelola oleh pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan

daerah untuk mendukung dan mendanai pemerintahan daerah dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi sebagai tujuan membentuk daerah otonom, merujuk kepada UU Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, dana perimbangan dibentuk sebagai suatu dukungan untuk menjalankan program otonomi daerah.

Dana perimbangan diberikan kepada daerah untuk meningkatkan sektor publik seperti pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 dana perimbangan dibagi menjadi 3, yaitu :

- a. Dana Bagi Hasil, merupakan sumber penerimaan daerah yang memperhatikan potensi penghasil daerah yang dibagi menjadi 3 bagian, sebagai berikut :
 - 1.) Dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan.
 - 2.) Dana bagi hasil biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan.
 - 3.) Dana bagi hasil PPh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan penghasilan.
- b. Dana Alokasi Umum, merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah demi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) sama dengan Dana Bagi Hasil (DBH) ialah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dana alokasi umum juga terbagi menjadi dua sebagai berikut :
 - 1.) Dana alokasi umum untuk provinsi.

2.) Dana alokasi umum untuk daerah kota/kabupaten.

c. Dana Alokasi Khusus, merupakan dana yang digunakan hanya untuk membiayai investasi pengadaan dan peningkatan perbaikan sarana prasana tetapi memiliki periode terbatas yang tidak lebih dari tiga tahun, selain itu dana alokasi khusus juga digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang ditetapkan pemerintah secara prioritas dan nasional, dana alokasi khusus digunakan untuk mendanai kegiatan khusus di beberapa daerah yang menawarkan. Akan tetapi ada beberapa sektor yang tidak dapat didanai oleh dana alokasi khusus seperti biaya pelatihan, biaya administrasi, biaya perjalanan pegawai, biaya penyiapan proyek dalam bentuk fisik, dan biaya umum sejenis lainnya.

2.2.4 Masyarakat Terdidik

Populasi adalah sekumpulan individu yang hidup di suatu tempat atau wilayah yang sama atau dengan kata lain penduduk, warga atau masyarakat merupakan jumlah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Populasi atau penduduk setiap tahun akan bertambah dan mengalami peningkatan dimana semakin terjadinya penambahan pada populasi maka akan terjadinya masalah fiskal dalam penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan masyarakat lainnya. (Putriani, 2011). Diantara jumlah seluruh populasi atau selanjutnya disebut masyarakat terdidik masyarakat yang telah mengenyam pendidikan tinggi, disini dapat dijelaskan dengan sebutan masyarakat terdidik. Masyarakat terdidik merupakan masyarakat yang

telah mengenyam pendidikan tinggi paling tidak setara SMA/SMK. Menerangkan semakin bertambahnya jumlah masyarakat yang terdidik maka akan mendorong peningkatan kebutuhan barang publik saat meningkatnya kebutuhan barang publik harus diimbangi dengan adanya penyediaan fasilitas publik yang harus ditambah oleh pemerintah yang dapat menyebabkan kenaikan anggaran pada pengeluaran pemerintah.



2.3 HUBUNGAN ANTAR VARIABEL

2.3.1 Hubungan Antara Pendapata Asli Daerah dengan Pengeluaran

Pemerintah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bidang keuangan selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun dan dituangkan dalam nilai mata uang. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (UU RI No 15 Tahun 2013). Hal ini menggambarkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu program dan rincian kegiatan serta praktek-praktek yang dilaksanakan pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dengan disertai prakiraan biaya belanja yang diperlukan serta pendapatan yang direncanakan untuk membiayainya.

Pendapatan Asli Daerah atau yg selanjutnya disebut PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. PAD sendiri merupakan salah satu instrumen dari APBD. Semakin tinggi PAD suatu daerah maka semakin tinggi pula jumlah APBD yang dimiliki daerah tersebut. Sehingga akan menyebabkan kenaikan pada Pembelanjaan Pemerintah. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah mempunyai hubungan signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah

2.3.2 Hubungan Antara Dana Perimbangan dengan Pengeluaran Pemerintah

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), selain ditujukan untuk konsolidasi desentralisasi fiskal dan memperkecil ketimpangan keuangan antara pusat dan daerah serta antar daerah dengan tetap menjaga netralitas fiskal, juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan daerah.

Dana Perimbangan merupakan salah satu instrumen dalam APBD yang bersumber dari pemerintah pusat. Pada umumnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah dan sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan Perundang-undangan. Hal ini menyebabkan daerah sangat tergantung kepada pemerintah pusat. Dengan demikian maka semakin besar dana perimbangan yang diperoleh maka semakin besar pula APBD. Sehingga Dana Perimbangan memiliki hubungan signifikan positif terhadap Pengeluaran Pemerintah.

2.3.3 Hubungan Antara Jumlah Masyarakat yang Terdidik dengan Pengeluaran Pemerintah

Di negara sedang berkembang yang mengalami ledakan jumlah penduduk termasuk Indonesia akan selalu mengkaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap negara, dengan

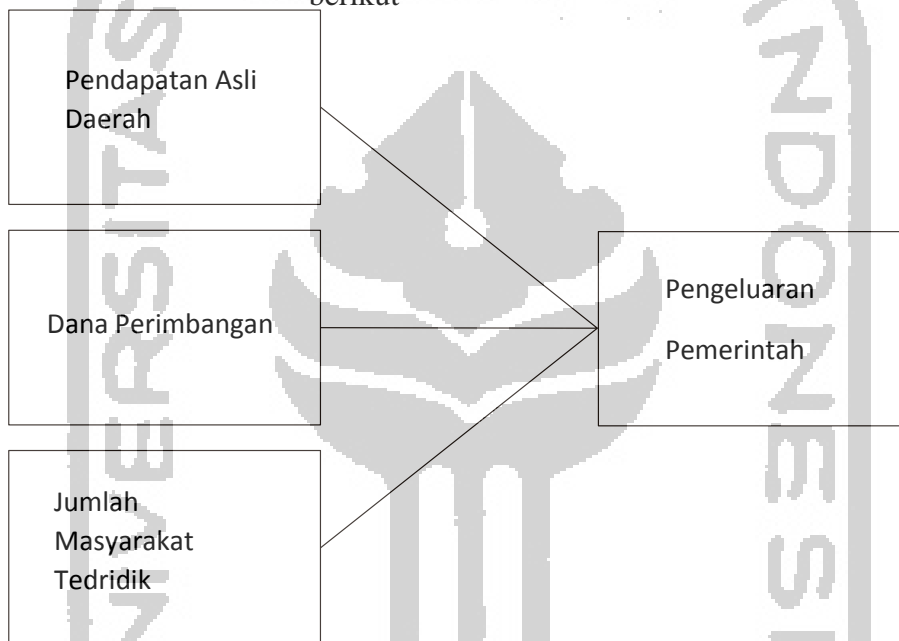
demikian tiap negara atau daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula (Wirosardjono:1998).

Jumlah masyarakat terdidik yang besar bagi Indonesia oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau ketrampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah masyarakat terdidik yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif (Widarjono, 1999). Dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang terdidik maka kebutuhan akan fasilitas publik akan naik, peningkatan fasilitas ini tentu akan membuat pengeluaran pemerintah semakin meningkat. Dengan demikian Jumlah masyarakat terdidik berpengaruh signifikan terhadap Pengeluaran pemerintah.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan bagian didalam tinjauan pustaka yang dimana didalamnya memuat mengenai rangkuman berdasarkan teori yang ada dalam penelitian. Gambaran pada kerangka pemikiran merupakan skema dari penelitian yang dilakukan. Skema tersebut adalah sebagai

berikut



2.4 Hipotesis

Hipotesa yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Pengeluaran Pemerintah.
2. Diduga Dana Perimbangan berpengaruh positif pada Pengeluaran Pemerintah.
3. Diduga Masyarakat Terdidik berpengaruh positif pada Pengeluaran Pemerintah.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di mana diperoleh dari beberapa sumber yang kemudian diolah dengan software tertentu. Jenis data yang digunakan adalah data panel. Data panel merupakan gabungan dari data time series dan cross section sehingga menjelaskan pada kurun waktu tertentu dan pada beberapa lokasi. Peneliti memperoleh data sekunder tersebut dari:

1. Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3. Sumber lain yang mendukung penelitian ini.

Data yang diambil dari sumber-sumber tersebut adalah data mengenai pengeluaran pemerintah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan jumlap masyarakat terdidik yang di mana ada pada 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai dari tahun 2008-2017

3.2. Definisi Operasional Variabel dan Variabel Penelitian

Pada penelitian ini, terdapat dua kategori mengenai variabel yang diteliti, yaitu variabel dependen, beserta variabel independen.

1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang di mana nilainya telah ditentukan dari model, sehingga keduanya merupakan variabel random atau stokastik (Widarjono, 2013). Dalam penelitian ini, variabel dependen

yang digunakan yaitu Pengeluaran Pemerintah pada 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengeluaran Pemerintah menjadi variabel dependen pada penelitian ini, yang di mana jumlah keseluruhan belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah pada 5 Kabupaten.Kota (Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta) ditahun 2008-2017 dengan satuan juta rupiah

2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang nilainya konstan dan nilainya ditentukan diluar model sehingga bukan termasuk variabel stokastik atau random (Widarjono, 2013). Variabel pada penelitian ini dipilih tujuannya untuk mengontrol nilai dari variabel dependen. Pada penelitian ini, variabel independen yang dipilih yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Masyarakat Terdidik pada 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh suatu daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data PAD diambil pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2008-2017 dengan satuan juta rupiah.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk dikelola oleh pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah untuk mendukung dan mendanai pemerintahan daerah dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi sebagai tujuan membentuk daerah otonom. Dana perimbangan yang digunakan pada setiap daerah, atau 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada kurun waktu 2008-2017. Satuan hitung untuk dana perimbangan yaitu juta rupiah.

c. Jumlah Masyarakat Terdidik

Masyarakat Terdidik adalah bagian dari populasi, yang merupakan kelompok masyarakat yang telah mengenyam pendidikan tinggi minimal setara SMA/SMK. Satuan hitung yang digunakan dalam variabel ini, adalah jiwa

3.3. Metode Analisis Penelitian

3.3.1. Uji Mackinnon, White and Davidson (MWD)

Uji Mackinnon, White and Davidson (MWD) utamanya dilakukan bertujuan untuk memilih bentuk model yang terbaik untuk digunakan, model tersebut diantaranya log-linier, atau model linier. Keduanya memiliki persamaan matematis yang berbeda, persamaan tersebut sebagai berikut:

Linier : $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$

Log Linier : $\log Y = \beta_0 + \beta_1 \log X_1 + \beta_2 \log X_2 + \beta_3 \log X_3 + e$

Keterangan:

Y = Pengeluaran Pemerintah

X1 = Pedapatan Asli Daerah

X2 = Dana Perimbangan

X3 = Jumlah masyarakat terdidik

Untuk melakukan Uji MWD tersebut, terlebih dahulu melalui beberapa prosedur, yang di mana menggunakan *software* aplikasi Eviews 9, yaitu:

1. Estimasi dalam bentuk model linier, beserta nilai prediksinya (*fitted value*) dan dinamai dengan Z1.
2. Estimasi dalam bentuk model log-linier, beserta nilai prediksinya dan dinamai dengan Z2.
3. Kemudian dapatkan nilai $Z1 = \ln F1 - F2$ dan $Z2 = \text{antilog } F2 - F1$.
4. Lakukan regresi dengan persamaan linier, yang di mana Z1 diikutsertakan.
5. Lakukan regresi dengan persamaan log-linier, yang di mana Z2 diikutsertakan.
6. Apabila Z1 signifikan secara statistik, melalui uji t maka kesimpulannya menolak H_0 yang di mana model yang baik berarti adalah model log- linier dan sebaliknya apabila tidak signifikan secara statistik maka gagal menolak H_0 dan model yang baik adalah model linier

7. Apabila Z_2 signifikan secara statistik, melalui uji t maka kesimpulannya menolak Hipotesis alternatif yang di mana model yang baik berarti adalah model linier dan sebaliknya apabila tidak signifikan secara statistik maka gagal menolak Hipotesis alternatif dan model yang baik adalah model log-linier.

3.3.2. Regresi Data Panel

Metode analisis yang digunakan yaitu dengan model regresi data panel. Dengan regresi data panel, terdapat beberapa keuntungan yang didapat. Yaitu, karena data panel merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section* maka mampu menjelaskan data lebih banyak, sehingga dapat menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Selain itu karena ada gabungan dari data *time series* dan *cross section* sehingga mampu mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (Widarjono, 2013). Analisis data panel pada dasarnya digunakan untuk mengamati hubungan antara satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas.

Data panel memiliki beberapa keunggulan yang di mana dapat dinilai secara statistik serta secara teori ekonomi, yaitu (Gujarati, 2003):

1. Data panel dapat memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu. Data panel dapat digunakan untuk menguji serta membangun model yang lebih kompleks.

2. Data panel dapat mengurangi masalah *omitted-variables* secara substansial
3. Didasarkan pada observasi *cross section* sehingga data panel baik digunakan dalam *study of dynamic adjustment*.
4. Jumlah observasi yang tinggi dapat berimbas pada data yang lebih informatif, variatif, kolinearitas antar variabel yang berkurang, dan peningkatan *degree of freedom* sehingga hasil estimasi yang efisien dapat diperoleh.

Pada dasarnya terdapat 3 teknik dalam melakukan regresi data panel, teknik tersebut yaitu *Pooled Least Square*, *Fixed Effect model*, dan *Random Effect Model*. Ketiganya memiliki perbedaan, dan fungsi masing-masing (Gujarati,2003):

1. *Pooled Least Square*

Penggunaan estimasi ini merupakan salah satu teknik yang paling sederhana dalam regresi data panel. Teknik ini hanya menggabungkan (*pooled*) antara data *time series* dengan data *cross section* dan

kemudian diestimasi dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS).

Hasil regresi ini, berlaku dalam semua waktu dan semua objek. Namun pada dasarnya, penggunaan estimasi cara ini memiliki kelemahan yang

di mana model tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi sebenarnya.

Kondisi pada objek satu dengan yang lain akan berbeda, dan objek

pada suatu waktu juga berbeda dengan objek pada waktu yang lain

(Winarno,2007).

2. *Fixed Effect Model*

Model *Fixed Effect* artinya bahwa satu objek memiliki konstan yang tetap besarnya untuk sebuah periode waktu. Koefisien regresinya juga besarnya tetap dari waktu ke waktu (*time invariant*). Dengan model ini, perbedaan konstan antar objek dapat ditunjukkan, dengan koefisien regressor yang sama (Winarno, 2007)

3. *Random Effect Model*

Model *Random Effect* pada dasarnya digunakan untuk mengatasi segala permasalahan yang ada pada metode *fixed effect* yang di mana menggunakan variabel semu sehingga model mengalami sebuah ketidakpastian. Apabila tidak menggunakan variabel semu, metode ini menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar objek dan antar waktu (Winarno, 2007).

Terdapat cara dalam memilih, atau menentukan metode estimasi dalam data panel, yaitu melalui beberapa uji, seperti uji chow, uji LM Test, Uji Hausman. Uji tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. *Pooled Least Square vs Fixed Effect Model* (Uji Chow Test/F-Statistik)

Pooled Least Square merupakan *restricted model* yang di mana dalam penerapannya memiliki intercept yang sama pada semua objek yang berlaku. dalam kenyataannya pada asumsi yang berlaku setiap unit pada *cross section* memiliki kesamaan perilaku yang tidak realistis karena kemungkinan pada setiap unit memiliki perilaku yang berbeda. Uji yang

digunakan dalam menentukan model dapat menggunakan Uji Chow Test atau F-Statistik, dengan hipotesis:

Ho : *Pooled Least Square/Common Effect Model (Restricted)*

Ha : *Fixed Effect Model (Unrestricted)*

Restricted F-Test dapat dirumuskan dengan cara sebagai berikut

$$F = \frac{SSRR - SSRU/q}{SSRU/(n - k)}$$

Keterangan :

SSRR = Sum of Squared Restricted Model

SSRU = Sum of Squared Unrestricted Model

q = Jumlah Restriksi

n = Jumlah Observasi

k = Jumlah Parameter dalam Model

Apabila nilai F-hitung > F-tabel, maka artinya menolak Ho sehingga kesimpulan yang didapat adalah model yang baik digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Sebaliknya, apabila nilai F-hitung < F-tabel, maka artinya gagal menolak Ho, sehingga kesimpulan yang didapat adalah model yang baik digunakan adalah *Common Effect Model*. Selain itu, dengan melihat nilai Probabilitas Cross-section Chi-square, apabila nilai probabilitas < nilai alfa, maka artinya signifikan dan menolak Ho, sehingga kesimpulan yang didapat adalah model yang baik digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai probabilitas > nilai alfa, maka artinya tidak signifikan dan gagal menolak Ho. Sehingga kesimpulan

yang didapat adalah model yang baik digunakan adalah *Common Effect Model*.

Apabila model *Fixed Effect* yang digunakan, maka harus diuji kembali dengan Uji Hausmann untuk memilih model yang baik antara *Fixed Effect Model*, atau *Random Effect Model*, sedangkan apabila model *Common Effect* yang digunakan maka juga harus diuji kembali dengan LM Test, untuk memilih model yang lebih baik antara *Common Effect Model*, atau *Random Effect Model*

2. *Pooled Least Square vs Random Effect Model* (LM Test)

Dalam penerapannya, untuk mengetahui model yang lebih baik antara *Random Effect* atau *Common Effect* dapat menggunakan uji Langrange Multiplier (LM). Uji ini didasarkan pada nilai residual pada metode OLS (Widarjono,2013).

Uji yang digunakan dalam menentukan model dapat menggunakan Uji LM Test dengan hipotesis:

H_0 : *Pooled Least Square/Common Effect Model (Restricted)*

H_a : *Random Effect Model (Unrestricted)*

Nilai statistic yang digunakan untuk menghitung LM yaitu 2^2

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left(a_n \cos \frac{\sum_{i=1}^n (\sum_{t=1}^T \hat{\epsilon}_{it})^2}{\sum_{i=1}^n (\sum_{t=1}^T \hat{\epsilon}_{it}^2)} - 1F \right)^2$$

Keterangan

n = jumlah individu

F = jumlah periode waktu

$\hat{\epsilon}$ = residual

T = jumlah observasi

Uji LM didasarkan atas distribusi chi-square dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel. Apabila nilai LM statistik > nilai kritis statistik chi-squares maka artinya menolak H_0 , atau kesimpulannya estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode *Random Effect Model*. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai LM statistik < nilai kritis statistik chi-squares maka artinya gagal menolak H_0 , yang kesimpulannya estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode *Common Effect Model*. Selain itu, untuk menilai antara kedua model tersebut dapat dilihat dari hasil LM Test pada *eviews*, yaitu pada nilai Breusch-Pagan, apabila lebih besar dari nilai alfa, maka tidak signifikan sehingga gagal menolak H_0 , atau estimasi yang tepat untuk model regresi yaitu dengan *Common Effect*. Sebaliknya apabila nilainya lebih kecil dari nilai alfa, maka signifikan sehingga menolak H_0 , atau estimasi yang tepat untuk model regresi yaitu dengan *Random Effect*

3. *Fixed Effect Model vs Random Effect Model* (Hausmann Test)

Dalam mengambil keputusan untuk menggunakan *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*, terdapat pertimbangan dengan melakukan uji yang di mana dengan melihat nilai pada Chi-square statistics, dengan begitu keputusan dapat diambil secara statistik. Dalam melakukan uji, terdapat hipotesa yang digunakan, yaitu:

Ho : *Random Effect Model*

Ha : *Fixed Effect Model*

Terdapat uji Hausmann, dengan mengikuti distribusi pada *chi-square*, dengan cara sebagai berikut:

$$m = \hat{q}'Var(\hat{q})^{-1}\hat{q}$$

Setelah dilakukan pengujian, apabila nilai statistic hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka menolak Ho, yang di mana artinya yaitu model yang tepat adalah model *Fixed Effect*. Begitu juga sebaliknya ketika nilai statistik Hausmann lebih kecil dari nilai kritisnya maka gagal menolak Ho, yang berarti yaitu model yang tepat adalah model *Random Effect*. Selain itu Hausmann test dapat dilihat dari nilai cross-section randomnya, apabila nilai probabilitas < nilai alfa, maka signifikan dan berarti menolak Ho, atau model yang tepat adalah *Fixed Effect Model*, begitu juga sebaliknya apabila nilai probabilitas > nilai alfa, maka tidak signifikan sehingga gagal menolak Ho, atau berarti model yang tepat adalah *Random Effect*.

3.3.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk melihat data apakah estimator yang telah digunakan sesuai dengan asumsi BLUE. Tujuan utamanya yaitu mendeteksi mengenai multikolineiritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Karena ketika terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam data, pada uji F dan uji t dapat mengalami kekacauan, karena tidak validnya data sehingga kesimpulan yang diambil dapat tidak valid.

A. Uji Multikolinieritas

Pada kenyataannya, sangat sering sekali terjadi adanya sebuah hubungan antar variabel independen dalam sebuah model regresi. Hubungan linier antara variabel independen tersebut disebut multikolinieritas. Pada prakteknya untuk mendapatkan estimator BLUE, tidak memerlukan asumsi terbebas dari masalah multikolinieritas. Estimator BLUE hanya mengenai hubungan asumsi tentang variabel gangguan.

Pada dasarnya, karena adanya multikolinieritas tetap menghasilkan estimator yang BLUE. Namun karena hal tersebut varian pada model tersebut menjadi besar. Kemudian, ketika terjadi multikolinieritas terdapat beberapa konsekuensi yang di mana varian menjadi membesar, serta standar error yang membesar. Berikut dampak mengenai adanya multikolinieritas:

- a.. Estimator masih bersifat BLUE. Namun estimator mempunyai varian dan kovarian yang besar sehingga sulit mendapatkan estimasi yang tepat.
- b. Akibatnya, interval akan membesar dan nilai hitung statistik uji t akan kecil, dan membuat variabel independen secara statistik tidak signifikan mempengaruhi variabel independen.
- c. Walaupun dengan uji t variabel independen tidak berpengaruh pada variabel dependen, namun koefisien determinasi R^2 masih bisa relatif tinggi.

Mendeteksi adanya multikolinieritas, dengan melihat koefisien determinasi yang tinggi. Dalam contoh diberikan asumsi yaitu lebih dari 0,8 serta variabel independen yang signifikan hanya sedikit yang signifikan terhadap variabel dependen melalui uji t. Namun melihat uji F secara statistik signifikan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Widarjono, 2013).

B. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan permasalahan yang ada pada varian dari variabel gangguan yang di mana tidak konstan sehingga estimator tidak memiliki varian yang minimum tetapi dalam hal ini estimator masih linier dan tidak bias (BLUE) (Widarjono, 2013).

Dalam mendeteksi adanya Heteroskedastisitas, terdapat beberapa cara. Namun peneliti menggunakan uji Glejser. Uji ini dilakukan dengan beberapa tahap dengan menggunakan eviews, yaitu:

1. Membuat residual absolut (resabs) dengan menggunakan generate series resabs=abs(resid)
2. Estimasi resabs dengan variabel independen, kemudian menggunakan metode *Fixed Effect Model*.
3. Setelah muncul hasil estimasi model, probabilitas pada setiap variabel menjadi pertimbangan. Apabila nilai probabilitas < nilai alfa, maka terdapat Heteroskedastisitas pada variabel tersebut, begitu juga sebaliknya, apabila nilai probabilitas > nilai alfa maka tidak terdapat Heteroskedastisitas.

C. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan korelasi yang ada pada antar variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lainnya. Dalam salah satu asumsi yang ada mengenai model OLS mengenai variabel gangguan, yaitu tidak terdapat hubungan antar variabel gangguan satu dengan variabel gangguan yang lainnya (Widarjono,2013).

3.3.4. Uji Hipotesis

A. Uji t (Pengujian Secara Individual)

Uji ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi serta pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t menghasilkan keputusan yaitu antara menolak H_0 atau gagal menolak H_0 yang didasari atas nilai statistik yang telah dilakukan, terdapat beberapa prosedur yaitu:

1. Menentukan Hipotesis,yaitu

a) $H_0 : \beta_1 \leq 0$ (tidak ada pengaruh).

b) $H_a : \beta_1 > 0$ (ada pengaruh positif).

2. Apabila nilai signifikansi dari probabilitas $<$ nilai alfa, maka menolak H_0 , yang berarti ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel dependen dengan variabel independen.

3. Apabila nilai signifikansi dari probabilitas $>$ nilai alfa, maka gagal menolak H_0 , yang berarti tidak ada pengaruh signifikan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Rumus untuk mencari t-statistik

$$\frac{b - \beta}{Se(b)}$$

Keterangan:

b= nilai koefisien

β = nilai b pada H_0

Se= standar eror dari β

Untuk t-tabel dapat diambil dari tabel distribusi t dengan *degree of freedom* tertentu (df) n-k, serta dengan koefisien alfa tertentu.

B. Uji F (Uji Secara Menyeluruh)

Uji terhadap variabel tidak hanya dilakukan antar variabel, dengan uji t. Namun juga dibutuhkan uji F yang di mana dilakukan secara menyeluruh untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap dependen. Uji F pada dasarnya digunakan untuk uji signifikansi model. Terdapat tahapan dalam melakukan Uji F, yaitu:

1. Menentukan hipotesis, yaitu

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

$$H_a: \beta \neq 0 \text{ dimana } k= 1,2,3 \dots k$$

2. Menurut F hitung dengan persamaan sebagai berikut

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - r^2) / (n - k)} \sim F[(k - 1), (n - k)]$$

Keterangan:

R^2 : R-Squared

k : jumlah variabel

n : jumlah

sampel

Nilai F kritis ditentukan dengan tabel distribusi F yang didasarkan pada besarnya alfa yang telah ditentukan dan df ditentukan oleh numerator (k-1) dan df denominator (n-k).

3. Apabila F hitung $>$ F kritis, maka kesimpulannya menolak H_0 , begitu juga sebaliknya ketika F hitung $<$ F kritis maka kesimpulannya gagal menolak H_0 . Selain itu dapat dilihat melalui nilai probabilitas dibandingkan dengan nilai alfa, ketika nilai probabilitas $<$ alfa maka keputusannya menolak H_0 , dan sebaliknya apabila nilai probabilitas $>$ alfa maka keputusannya gagal menolak H_0 .

C. Koefisien Determinasi (RSquared)

R^2 menjelaskan mengenai seberapa besar presentase dari total variabel dependen yang dipengaruhi oleh model tersebut. Kisaran nilai untuk R^2 yaitu 0 sampai dengan 1, semakin besar, atau semakin mendekati 1 maka model yang dijelaskan semakin baik, namun sebaliknya, ketika nilainya mendekati 0 maka model yang dijelaskan tidak terdapat hubungan yang jelas

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang di mana data diambil dari Badan Pusat Statistik, serta sumber lain terkait yang relevan sesuai dengan obyek yang diteliti. Data tersebut meliputi data pengeluaran pemerintah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan jumlah masyarakat terdidik yang ada pada Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana data tersebut dimulai pada tahun 2008 hingga 2017.

Data tersebut diolah seperti apa yang telah dijelaskan menggunakan model log-linier sesuai hasil Uji MWD (MacKinnon, White, Davidson). Kemudian data diolah menggunakan *Random Effect Model*. Penelitian ini variabel dependen yang digunakan yaitu data pengeluaran pemerintah (Y) dengan satuan juta rupiah, kemudian variabel independen yang digunakan yaitu pendapatan asli daerah (X1) dengan satuan juta rupiah, dana perimbangan (X2) dengan satuan juta rupiah, dan jumlah masyarakat terdidik (X3) dengan satuan jiwa.

4.2. Hasil Uji Model Regresi Panel

4.2.1. Uji MWD (MacKinnon, White, Davidson)

Dalam uji ini, mengingat pentingnya pemilihan bentuk empirik yang di mana digunakan untuk menentukan bentuk model linier atau non-linier dalam penelitian ini dibutuhkan uji MWD (MacKinnon, White, Davidson) maka dalam penelitian dibutuhkan uji tersebut. Hasil dari uji tersebut yaitu:

Tabel 4.1

Hasil Uji MWD Linier

Dependent Variable: PP
Method: Panel Least Squares
Date: 07/31/19 Time: 21:01
Sample: 2008 2017
Periods included: 10
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-112299.5	65864.95	-1.704997	0.0951
PAD	1.064479	0.135659	7.846714	0.0000
DP	1.305994	0.090981	14.35465	0.0000
MT	0.436682	0.241999	1.804477	0.0779
Z1	-402686.9	575246.4	-0.700025	0.4875

Sumber: lampiran hasil regresi

Tabel 4.2

Hasil Uji MWD log-linier

Dependent Variable: LOG(PP)
Method: Panel Least Squares
Date: 07/31/19 Time: 21:02
Sample: 2008 2017
Periods included: 10
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.606872	0.661965	0.916773	0.3641
LOG(PAD)	0.201845	0.022509	8.967287	0.0000
LOG(DP)	0.816719	0.052181	15.65156	0.0000
LOG(MT)	-0.009394	0.041142	-0.228323	0.8204
Z2	-5.67E-07	3.38E-07	-1.678956	0.1801

Sumber: lampiran hasil regresi

Tabel 4.3

Hasil Uji MWD

Variabel	Nilai Statistik-t	Nilai table-t α (=10%)	Nilai Probabilitas	Probabilitas
Z1	-0.700025	1,67943	0.4875	Tidak Signifikan
Z2	-1.678956	1,67943	0.1801	Tidak Signifikan

Sumber: lampiran hasil regresi

Berdasarkan hasil uji MWD (MacKinnon, White, Davidson) di atas, maka dapat diambil kesimpulan mengenai hasil uji tersebut, yaitu dalam penerapannya dapat menggunakan model linier, maupun log-linier. Hasil uji tersebut mengindikasikan bahwa kedua model tidak signifikan, sehingga dapat menggunakan kedua model tersebut. Dalam pengambilan keputusan, peneliti menggunakan model log-linier.

4.2.2. Hasil Regresi Panel

Dalam pemilihan model regresi, diperlukan uji terlebih dahulu untuk menentukan pemilihan regresi pada data panel, sehingga pada setiap penelitian memiliki dasar dalam bentuk statistik untuk melandasi sebuah pertimbangan.

1. Uji Chow Test (F-Statistik)

Dalam pengujian ini untuk mengetahui pemilihan model yang di mana antara menggunakan estimasi model *Common Effect Model*, atau *model estimasi Fixed Effect*, dalam uji tersebut terdapat hipotesis yaitu:

Ho : menggunakan model estimasi *Common Effect*

Ha : menggunakan model estimasi *Fixed Effect*

Pada uji ini, dapat dilihat nilai pada p-value yang terdapat pada estimasi model. Apabila pada nilai p-value kurang dari 10% (0,1) yang di mana berarti data tersebut signifikan, maka dapat ditarik kesimpulan model estimasi yang digunakan adalah *fixed effect*, akan tetapi jika p-value pada data tersebut lebih dari 10% (0,1) maka model estimasi yang digunakan adalah *Common Effect*

Tabel 4.4
Uji Chow (F-Statistik)

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.590690	(4,42)	0.0502
Cross-section Chi-square	11.026301	4	0.0263

Sumber: lampiran hasil regresi

Dari hasil pengujian antara *Common Effect* dengan *Fixed Effect*, menunjukkan bahwa Cross-Section Chi-Square pada hasil uji tersebut yaitu 11,026301 dengan probabilitas sebesar 0,0263. Dengan hasil tersebut, probabilitas kurang dari 10% (0,1) sehingga secara statistik menolak H_0 , dan menerima H_a . Kesimpulan pada hasil uji tersebut yaitu model estimasi yang tepat yaitu menggunakan model estimasi *Fixed Effect*

2. Uji Hausman Test

Dalam pengujian ini untuk mengetahui pemilihan model yang di mana antara menggunakan estimasi model Random Effect, atau model estimasi Fixed Effect, dalam uji tersebut terdapat hipotesis yaitu:

Ho : menggunakan model estimasi *Random Effect*

Ha : menggunakan model estimasi *Fixed Effect*

Pada uji ini, dapat dilihat nilai pada p-value yang terdapat pada estimasi model. Apabila pada nilai p-value kurang dari 10% (0,1) yang di mana berarti data tersebut signifikan, maka dapat ditarik kesimpulan model estimasi yang digunakan adalah *fixed effect*, akan tetapi jika p-value pada data tersebut lebih dari 10% (0,1) maka model estimasi yang digunakan adalah *Random Effect*

Tabel 4.5

Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.908236	3	0.1786

Sumber: lampiran hasil regresi

Dari pengujian antara *Random Effect* dan *Fixed Effect*, menunjukkan bahwa Cross-Section Random pada hasil uji tersebut yaitu 4,908236 dengan probabilitas sebesar 0,1786. Dengan hasil tersebut, probabilitas lebih dari 10% (0,1) sehingga secara statistik gagal menolak Ho, dan menerima Ha. Kesimpulan pada hasil uji tersebut yaitu model estimasi yang tepat yaitu menggunakan model estimasi *Random Effect*

1. Hasil Estimasi Random Effect

Dependent Variable: LOG(PP)
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 07/31/19 Time: 21:14
 Sample: 2008 2017
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 50
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.383926	1.050222	1.317746	0.1941
LOG(PAD)	0.228966	0.033309	6.874060	0.0000
LOG(DP)	0.739865	0.079254	9.335401	0.0000
LOG(MT)	-0.014203	0.062821	-0.226081	0.8221
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.044178	0.2241
Idiosyncratic random			0.082198	0.7759
Weighted Statistics				
R-squared	0.945109	Mean dependent var		7.100024
S	0.941530	S.D. dependent var		0.346911
S.E. of regression	0.083885	Sum squared resid		0.323690
F-statistic	264.0098	Durbin-Watson stat		1.506920
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.949720	Mean dependent var		14.00094
Sum squared resid	0.373606	Durbin-Watson stat		1.305589

Sumber: lampiran hasil regresi

4.3. Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Multikolinieritas

Pada kenyataannya, sangat sering sekali terjadi adanya sebuah hubungan antar variabel independen dalam sebuah model regresi. Hubungan linier antara variabel independen tersebut disebut multikolinieritas. Pada prakteknya untuk mendapatkan estimator BLUE, tidak memerlukan asumsi terbebas dari masalah

multikolinieritas. Estimator BLUE hanya mengenai hubungan asumsi tentang variabel gangguan.

Pada dasarnya, karena adanya multikolinieritas tetap menghasilkan estimator yang BLUE. Namun karena hal tersebut varian pada model tersebut menjadi besar. Kemudian, ketika terjadi multikolinieritas terdapat beberapa konsekuensi yang di mana varian menjadi membesar, serta standar error yang membesar. Berikut dampak mengenai adanya multikolinieritas:

1. Estimator masih bersifat BLUE. Namun estimator mempunyai varian dan kovarian yang besar sehingga sulit mendapatkan estimasi yang tepat.
2. Akibatnya, interval akan membesar dan nilai hitung statistik uji t akan kecil, dan membuat variabel independen secara statistik tidak signifikan mempengaruhi variabel independen.
3. Walaupun dengan uji t variabel independen tidak berpengaruh pada variabel dependen, namun koefisien determinasi R^2 masih bisa relatif tinggi.

Mendeteksi adanya multikolinieritas, dengan melihat koefisien determinasi yang tinggi. Dalam contoh diberikan asumsi yaitu lebih dari 0,8 serta variabel independen yang signifikan hanya sedikit yang signifikan terhadap variabel dependen melalui uji t. Namun melihat uji F secara statistik signifikan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Widarjono,2013).

Tabel 4.6

Tabel Multikolinieritas

	Log(PAD)	Log(DP)	Log(POP)
Log(PAD)	1	0.622320834941084	0.6984604542225194
Log(DP)	0.622320834941084	1	0.4658607979697303
Log(MT)	0.6984604542225194	0.4658607979697303	1

Sumber: lampiran hasil regresi

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DP = Dana Perimbangan

MT = Masyarakat Terdidik

Pada hasil tabel tersebut mengindikasikan, bahwa antar variabel, tidak memiliki hubungan multikolinieritas, dikarenakan tidak memenuhi asumsi dari nilai yang di mana di atas 0,8. Variabel pada model estimasi tersebut dinyatakan bebas dari multikolinieritas.

4.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan permasalahan yang ada pada varian dari variabel gangguan yang di mana tidak konstan sehingga estimator tidak memiliki varian yang minimum tetapi dalam hal ini estimator masih linier dan tidak bias (BLUE) (Widarjono,2013).

Dalam mendeteksi adanya Heteroskedastisitas, terdapat beberapa cara. Namun peneliti menggunakan uji Glejser. Uji ini dilakukan dengan beberapa tahap dengan menggunakan eviews, yaitu:

1. Membuat residual absolut (resabs) dengan menggunakan generate series $\text{resabs}=\text{abs}(\text{resid})$
2. Estimasi resabs dengan variabel independen, kemudian menggunakan metode Fixed Effect Model.
3. Setelah muncul hasil estimasi model, probabilitas pada setiap variabel menjadi pertimbangan. Apabila nilai probabilitas $<$ nilai alfa, maka terdapat Heteroskedastisitas pada variabel tersebut, begitu juga sebaliknya, apabila nilai probabilitas $>$ nilai alfa maka tidak terdapat Heteroskedastisitas.

Tabel 4.7

Tabel Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: LOG(PP)
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 07/31/19 Time: 21:27
 Sample: 2008 2017
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 50
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.526850	0.640692	0.822314	0.4152
LOG(PAD)	0.018189	0.021597	0.576657	0.6829
LOG(DP)	0.007695	0.050541	0.981127	0.9161
LOG(MT)	0.010077	0.037845	0.266276	0.7912
RESABS	0.156336	0.258365	0.605096	0.5482

Sumber: lampiran hasil regresi

Pada data tersebut, nilai probabilitas menjadi pertimbangan yang di mana, sesuai dengan asumsi yang telah diatur, yaitu probabilitas setiap variabel dibandingkan dengan nilai alfa. Berdasarkan hasil tersebut, maka probabilitas dari semua variabel independen lebih besar dari nilai alfa 10%

(0,1) sehingga dapat dipastikan bahawa variabel bebas dari Heteroskedastisitas.

4.4. Uji Hipotesis

4.4.1. Uji t (Pengujian Secara Individu)

Uji t dilakukan bertujuan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pada setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Selain itu, dapat mengetahui seberapa besar pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara individu

Tabel 4.8
Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.383926	1.050222	1.317746	0.1941
LOG(PAD)	0.228966	0.033309	6.874060	0.0000
LOG(DP)	0.739865	0.079254	9.335401	0.0000
LOG(MT)	-0.014203	0.062821	-0.226081	0.8221

Sumber: lampiran hasil regresi

1. Pengujian terhadap Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1)

Berdasarkan pada hasil estimasi tersebut, didapatkan hasil probabilitas dari variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 0,0000. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari 10%, maka variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) signifikan positif terhadap Pengeluaran Pemerintah (Y).

2. Pengujian terhadap Dana Perimbangan (X2)

Berdasarkan pada hasil estimasi tersebut, didapatkan hasil probabilitas dari variabel Produk Domestik Regional Bruto (X2) sebesar 0,0000. Hasil

tersebut mengindikasikan bahwa nilai probabilitas kurang dari 10%, maka variabel Dana Perimbangan (X2) signifikan positif terhadap Pengeluaran Pemerintah (Y)

3. Pengujian terhadap Jumlah Masyarakat Terdidik (X3)

Berdasarkan pada hasil estimasi tersebut, didapatkan hasil probabilitas dari variabel Masyarakat Terdidik (X3) sebesar 0,8221. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 10%, maka variabel jumlah masyarakat terdidik (X3) tidak signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah (Y).

4.4.2. Uji F (Uji Secara Menyeluruh)

Uji F dilakukan bertujuan untuk mengetahui, apakah setiap variabel independen yang diujikan signifikan atau tidak secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 4.9

Hasil Uji F dengan Estimasi Random Effect

R-squared	0.945109	Mean dependent var	7.100024
S	0.941530	S.D. dependent var	0.346911
S.E. of regression	0.083885	Sum squared resid	0.323690
F-statistic	264.0098	Durbin-Watson stat	1.506920
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.949720	Mean dependent var	14.00094
Sum squared resid	0.373606	Durbin-Watson stat	1.305589

Sumber: lampiran hasil regresi

Berdasarkan pada hasil estimasi tersebut didapatkan bahwa nilai Prob(F- statistics) sebesar 0,00000 yang di mana berarti nilai probabilitas(f-statistics) tersebut kurang dari nilai alfa 10%, maka model tersebut signifikan pada nilai 10% dan berarti menolak asumsi Ho. Artinya, model pada hasil Uji F tersebut layak dan variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

4.4.3. Koefisien Determinasi (R-Squared)

Pengujian ini dilakukan dalam rangka untuk mengukur tingkat prosentase dari variasi total variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh model regresi pada estimasi model tersebut. Perhitungan dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan yang baik dalam analisis yang dirunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi R- Squared.

Tabel 4.10

Hasil R-Squared dengan Estimasi Random Effect

R-squared	0.945109
S	0.941530
S.E. of regression	0.083885
F-statistic	264.0098
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: lampiran hasil regresi

Dari hasil estimasi tersebut didapatkan bahwa besarnya R-squared yaitu mampu menjelaskan variabel dependen (Pengeluaran Pemerintah) sebesar 94,51% sedangkan sisanya sebesar 5,49% dijelaskan variabel lain diluar model.

4.5. Interpretasi Hasil

Menjelaskan hasil interpretasi antar variabel, yaitu variabel independen dengan variabel dependen, yang didasarkan pada koefisien variabel.

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1)

Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah, yang mana setiap kenaikan PAD sebesar 1% maka akan mempengaruhi pengeluaran pemerintah sebesar 0,228966%

2. Variabel Dana Perimbangan (X2)

Dana Perimbangan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah, yang di mana setiap kenaikan Dana Perimbangan sebesar 1% maka akan mempengaruhi pengeluaran pemerintah sebesar 0,739865%

3. Variabel Jumlah Masyarakat Terdidik (X3)

Jumlah Masyarakat Terdidik, tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah

4.6. Analisis Ekonomi

Dalam hasil analisis penelitian ini faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008 hingga 2017 adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan jumlah masyarakat terdidik. Pengaruh masing-masing variabel yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Dari penelitian tersebut didapatkan hasil yaitu pendapatan asli daerah mampu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan hipotesis yang telah dinyatakan pada penelitian tersebut.

Pendapatan asli daerah dapat didefinisikan sebagai penerimaan yg bersumber dari pungutan diwilayah tertentu. Sehingga ketika pendapatan asli daerah tersebut mengalami kenaikan maka tandanya anggaran belanja untuk pemerintah juga mengalami kenaikan. Akibatnya pengeluaran pemerintah menjadi lebih meningkat sebab anggaran yang disediakan lebih banyak.

2. Dana perimbangan

Didalam penelitian tersebut mendapatkan hasil yang menyatakan dana perimbangan dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana perimbangan merupakan dana yang digelontorkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pendanaan kebutuhan daerah. Di provinsi Yogyakarta sendiri dana perimbangan sangat mendominasi

jumlahnya di dalam APBD. Sehingga dana perimbangan akan sangat berpengaruh didalam anggaran belanja pemerintah. Dengan semakin tingginya dana perimbangan maka anggaran belanja juga akan semakin meningkat, artinya semakin tinggi anggaran yang disediakan maka semakin tinggi pula pengeluaran pemerintah.

3. Jumlah Masyarakat Terdidik

Pada penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu mengenai pengaruh jumlah masyarakat terdidik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah, dibuktikan dengan nilai probabilitas yang lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,8221 lebih besar dari 10% (0,10)

Hal tersebut disebabkan karena jumlah masyarakat yang terdidik di Daerah Istimewa Yogyakarta kurang mendominasi masyarakat yang ada. Rata rata disetiap wilayah Kabupaten atau kota di Yogyakarta hanya memiliki 36-46% masyarakat terdidik (BPS D.I.Yogyakarta). Sehingga pemerintah tidak terlalu menggunakan pengeluarannya untuk memfasilitasi masyarakat tersebut. Dengan kata lain pemerintah lebih fokus terhadap fasilitas yang dapat digunakan masyarakat secara umum.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian, setelah melalui pengolahan dan analisis ekonomi pada penelitian yang berjudul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2017”. Peneliti dapat menyimpulkan yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Pengeluaran Pemerintah di masing-masing daerah Kota dan Kabupaten se Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berarti sesuai dengan hipotesa. Variabel ini menggambarkan peranan PAD dalam membiayai pengeluaran pemerintah pada masing-masing daerah yang mana pengeluaran tersebut terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

2. Dana Perimbangan

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah. Hal ini sesuai dengan hipotesa yang sudah ada. Variabel ini menggambarkan peranan Dana Perimbangan ketika terjadi kenaikan jumlah didalam Dana Perimbangan maka akan berpengaruh terhadap kenaikan jumlah Pengeluaran Pemerintah.

3. Masyarakat Terdidik

Menurut hasil uji parsial dapat disimpulkan bahwa variabel Masyarakat Terdidik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah. Hal ini disebabkan jumlah masyarakat terdidik di setiap daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang kurang mendominasi, sehingga kurang mampu mempengaruhi pengeluaran pemerintah di masing-masing daerah secara signifikan.

4. Secara simultan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Masyarakat Terdidik terhadap Pengeluaran Pemerintah

Secara bersama-sama variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Masyarakat Terdidik berpengaruh signifikan positif terhadap Pengeluaran Pemerintah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.2 Implikasi

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan, maka implikasi yang berkaitan dengan penelitian adalah:

1. Pemda perlu meningkatkan PAD dengan memaksimalkan kekayaan sumber daya alam seperti tempat-tempat wisata, daerah tambang, daerah pertanian dan memberikan modal kepada masyarakat yang memiliki kekayaan alam untuk diolah dan dijadikan pemasukan daerah sehingga dapat meningkatkan PAD.

2. Untuk Dana Perimbangan, pengelola perlu mengetahui sumber-sumber pendapatan masing-masing daerah sehingga dapat menyeimbangkan antara pendapatan dengan pengeluaran dengan lebih seksama. Kemudian diharapkan pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah agar daerah lebih maju dan mencapai kemandirian ekonomi.
3. Untuk Jumlah Masyarakat Terdidik, pemerintah daerah perlu menata kembali kebijakan kependudukan di wilayah masing-masing. Selain itu pemerintah perlu mensosialisasikan pentingnya pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang peranan masyarakat dalam keikutsertaannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Daerah yang maju adalah daerah yang memiliki sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan tinggi yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian serta kesejahteraan masyarakatnya meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari, 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli daerah (Studi Kasus kabupaten dan Kota se Jawa- Bali)*, Simposium Nasional Akuntansi. Padang.
- Alodia, Moristha. (2016). *Analisis Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Fakultas Ekonomi.
- Badan Pusat Statistik. (2009-2017). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik
- Brata, Aloysius Gunadi. 2004. *Komposisi Penerimaan Sektor Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Budi Setyawan dan Priyo Hari Adi. *Pengaruh Fiscal Stress Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah)*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana. Simposium Nasional Riset Ekonomi & Bisnis Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTİK) 28 Juni 2008.
- Devita, Andri: Delis, Arman: Junaidi. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi*. Skripsi. Universitas Jambi, Jambi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Dinda, Faradilla (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Populasi terhadap Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur periode 2010-2016*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Fakultas Ekonomi.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Gujarati, Damodar N. 2003. *Fourth Edition, Basics Econometrics*. New York: McGraw-Hill.
- Halim, Abdul. 2001. *Analisis Diskripsi Pengaruh Fiskal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*. KOMPAK. STIE YO. Yogyakarta. 127-146.

- Hartanto, Eko. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2007-2011*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Fakultas Ekonomi
- Kesit. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY) JAAI volume 8 no. 2, Desember 2004 101.*
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sukirno, S. (2015). *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Todaro, M., & Smith, S. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Widarjono, Agus 1999. *Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia : Analisis Kausalitas* , Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 4 No 2 Tahun 1999.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Winarno, W. W. (2007). *Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Wirosardjono, Sucipto, 1998. *Pertumbuhan Penduduk Indonesia Catatan Analisa*, Prisma, No 3 Tahun XVII

Daftar Lampiran

Lampiran I

Tabel Data

Kabupaten	Tahun	PP	PAD	DP	MT
Yogyakarta	2008	710905,91	132427,04	509881,38	205170
Yogyakarta	2009	796236,76	161482,44	517366,88	205376
Yogyakarta	2010	840628,13	179423,64	484628,28	208336
Yogyakarta	2011	932018,51	228833,29	500613,75	213281
Yogyakarta	2012	1157578,92	338283,73	602310,07	222985
Yogyakarta	2013	1309580,19	383052,14	658770,84	208484
Yogyakarta	2014	1336633,01	470634,76	663712,27	214724
Yogyakarta	2015	1539699,34	510548,83	652748,11	225362
Yogyakarta	2016	1665420,97	540504,3	875430,55	218650
Yogyakarta	2017	1484920,7	657049,37	871360,23	218401
Bantul	2008	1045423,33	69800,76	679250,09	169013
Bantul	2009	903767,01	88691,36	668488,98	269747
Bantul	2010	1012356,84	81541,24	688676,56	273724
Bantul	2011	1151935	128900,08	717123,24	272013
Bantul	2012	1282878	166597,77	885352,41	287158
Bantul	2013	1387719	224197,85	938492,07	293503
Bantul	2014	1901355,82	288038,72	1042578,6	314321
Bantul	2015	1979120,89	312419,91	1037859,45	315439
Bantul	2016	2223664,63	349492,78	1152588,35	333959
Bantul	2017	2161336,55	369224,76	1435225,75	338983
Sleman	2008	905648	138637,7	695038,29	329917
Sleman	2009	1016026,6	157231,26	717703,16	338335
Sleman	2010	1131602,39	163056,45	740198,02	347500
Sleman	2011	1278055,85	226723,27	753889	356562
Sleman	2012	1421401,17	301069,53	946821,04	365270
Sleman	2013	1693528,29	449270,3	992782,43	374387
Sleman	2014	1896477,37	573337,59	1034404,52	383486
Sleman	2015	2328751,91	643130,07	1080162,44	398404
Sleman	2016	2647865,81	648841,91	1321933,39	412614
Sleman	2017	2615343,53	698754,16	1438087,47	426337
Gunung Kidul	2008	717302,22	32907,61	591432,82	114284
Gunung Kidul	2009	694325,51	38455,4	609362,83	116705
Gunung Kidul	2010	765190,18	42521,52	635502,49	119261
Gunung Kidul	2011	938850,01	54462,41	667004,71	121773
Gunung Kidul	2012	1073158,31	67050,78	799932,04	124167
Gunung Kidul	2013	1236639,66	66710,85	879073,98	129619

Gunung Kidul	2014	1267067,5	159304,33	923974,08	134008
Gunung Kidul	2015	1586001,34	196099,54	978310,03	135163
Gunung Kidul	2016	1651553,25	206278,22	1239624,36	141562
Gunung Kidul	2017	1860225,53	271370,74	1250742,43	144585
Kulon Progo	2008	595861,61	42289,2	478584,75	118873
Kulon Progo	2009	576558,92	39358,62	494268,84	120337
Kulon Progo	2010	612902,63	48190,8	485094,12	121475
Kulon Progo	2011	780620,06	53752,29	522276,92	123029
Kulon Progo	2012	881690,24	74028,66	612419,55	125454
Kulon Progo	2013	964587,54	95991,51	681454,83	123739
Kulon Progo	2014	1060577,34	158623,92	708270,65	129062
Kulon Progo	2015	1142545,63	170822,32	729998,68	138182
Kulon Progo	2016	1249917,16	180273,36	957551,58	144906
Kulon Progo	2017	1440263,09	221215,01	979213,03	147249

Keterangan

PP = Pengeluaran Pemerintah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DP = Dana Perimbangan

MT = Masyarakat Terdidik

Lampiran II

Hasil Uji MWD Regresi Linier

Dependent Variable: PP
Method: Panel Least Squares
Date: 07/31/19 Time: 21:01
Sample: 2008 2017
Periods included: 10
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-112299.5	65864.95	-1.704997	0.0951
PAD	1.064479	0.135659	7.846714	0.0000
DP	1.305994	0.090981	14.35465	0.0000
MT	0.436682	0.241999	1.804477	0.0779
Z1	-402686.9	575246.4	-0.700025	0.4875
R-squared	0.946755	Mean dependent var		1297074.
Adjusted R-squared	0.942022	S.D. dependent var		518889.9
S.E. of regression	124941.2	Akaike info criterion		26.40371
Sum squared resid	7.02E+11	Schwarz criterion		26.59492
Log likelihood	-655.0928	Hannan-Quinn criter.		26.47652
F-statistic	200.0383	Durbin-Watson stat		1.536264
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran III

Hasil Uji Regresi Log Linier

Dependent Variable: LOG(PP)
Method: Panel Least Squares
Date: 07/31/19 Time: 21:02
Sample: 2008 2017
Periods included: 10
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.606872	0.661965	0.916773	0.3641
LOG(PAD)	0.201845	0.022509	8.967287	0.0000
LOG(DP)	0.816719	0.052181	15.65156	0.0000
LOG(MT)	-0.009394	0.041142	-0.228323	0.8204
Z2	-5.67E-07	3.38E-07	-1.678956	0.1801

R-squared	0.955194	Mean dependent var	14.00094
Adjusted R-squared	0.951211	S.D. dependent var	0.389414
S.E. of regression	0.086014	Akaike info criterion	-1.973965
Sum squared resid	0.332931	Schwarz criterion	-1.782762
Log likelihood	54.34911	Hannan-Quinn criter.	-1.901154
F-statistic	239.8330	Durbin-Watson stat	1.493057
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran IV

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.590690	(4,42)	0.0502
Cross-section Chi-square	11.026301	4	0.0263

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LOG(PP)

Method: Panel Least Squares

Date: 07/31/19 Time: 21:04

Sample: 2008 2017

Periods included: 10

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.468988	0.669712	0.700284	0.4873
LOG(PAD)	0.197434	0.022793	8.662084	0.0000
LOG(DP)	0.811111	0.053094	15.27693	0.0000
LOG(MT)	0.012661	0.039752	0.318509	0.7515
R-squared	0.952387	Mean dependent var		14.00094
Adjusted R-squared	0.949282	S.D. dependent var		0.389414
S.E. of regression	0.087698	Akaike info criterion		-1.953206
Sum squared resid	0.353787	Schwarz criterion		-1.800244
Log likelihood	52.83016	Hannan-Quinn criter.		-1.894957
F-statistic	306.7100	Durbin-Watson stat		1.444488
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran V

Hasil Uji Hausmann

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.908236	3	0.1786

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(PAD)	0.331033	0.228966	0.002135	0.0272
LOG(DP)	0.508157	0.739865	0.013826	0.0488
LOG(MT)	-0.119579	-0.014203	0.026048	0.5138

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LOG(PP)

Method: Panel Least Squares

Date: 07/31/19 Time: 21:06

Sample: 2008 2017

Periods included: 10

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.585669	2.157383	2.125571	0.0395
LOG(PAD)	0.331033	0.056959	5.811808	0.0000
LOG(DP)	0.508157	0.141800	3.583612	0.0009
LOG(MT)	-0.119579	0.173190	-0.690450	0.4937

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.961810	Mean dependent var	14.00094
Adjusted R-squared	0.955445	S.D. dependent var	0.389414
S.E. of regression	0.082198	Akaike info criterion	-2.013732
Sum squared resid	0.283771	Schwarz criterion	-1.707809
Log likelihood	58.34331	Hannan-Quinn criter.	-1.897235
F-statistic	151.1094	Durbin-Watson stat	1.607467
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran VI

Hasil Regresi Random Effect

Dependent Variable: LOG(PP)
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 07/31/19 Time: 21:14
 Sample: 2008 2017
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 50
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.383926	1.050222	1.317746	0.1941
LOG(PAD)	0.228966	0.033309	6.874060	0.0000
LOG(DP)	0.739865	0.079254	9.335401	0.0000
LOG(MT)	-0.014203	0.062821	-0.226081	0.8221

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.044178	0.2241
Idiosyncratic random		0.082198	0.7759

Weighted Statistics			
R-squared	0.945109	Mean dependent var	7.100024
S	0.941530	S.D. dependent var	0.346911
S.E. of regression	0.083885	Sum squared resid	0.323690
F-statistic	264.0098	Durbin-Watson stat	1.506920
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.949720	Mean dependent var	14.00094
Sum squared resid	0.373606	Durbin-Watson stat	1.305589

Lampiran VII

Tabel Hasil Uji Multikolinieritas

	Log(PAD)	Log(DP)	Log(POP)
Log(PAD)	1	0.622320834941084	0.6984604542225194
Log(DP)	0.622320834941084	1	0.4658607979697303
Log(MT)	0.6984604542225194	0.4658607979697303	1



Lampiran VIII

Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: LOG(PP)
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 07/31/19 Time: 21:27
 Sample: 2008 2017
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 50
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.526850	0.640692	0.822314	0.4152
LOG(PAD)	0.018189	0.021597	0.576657	0.6829
LOG(DP)	0.007695	0.050541	0.981127	0.9161
LOG(MT)	0.010077	0.037845	0.266276	0.7912
RESABS	0.156336	0.258365	0.605096	0.5482
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.000000	0.0000
Idiosyncratic random			0.082959	1.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.952726	Mean dependent var		14.00094
Adjusted R-squared	0.948524	S.D. dependent var		0.389414
S.E. of regression	0.088351	Sum squared resid		0.351267
F-statistic	226.7268	Durbin-Watson stat		1.409321
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.952726	Mean dependent var		14.00094
Sum squared resid	0.351267	Durbin-Watson stat		1.409321